

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS KETENAGAKERJAAN**



Rencana Kerja

2022



Alamat : Jln. H.A.Mappanyukki No. Telp./ (0481)
22457, Watampone, Kab. Bone, Prov. Sul-Sel
Email : disnakerkabbone@gmail.com /



Website



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2020 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I : Dinas Pendidikan
Lampiran II : Dinas Kesehatan

Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah

Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 48

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Rencana Kerja ini substansinya menjabarkan potret permasalahan ketenagakerjaan serta program tahun 2020 yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Dalam Rencana Kerja perubahan ini juga dikembangkan model perencanaan strategis yang intinya mengacu pada visi, misi dan program berbasis pada analisis lingkungan dan isu-isu strategis yang berkembang dibidang ketenagakerjaan. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2022 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahun 2022 ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Rencana Kerja perubahan (Renja perubahan) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2022 juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana stratejik yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya.

Dengan demikian Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bone yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bone.

Watampone, 29 Juli 2021

Kepala Dinas,

The image shows a circular official stamp of the Bone Regency Government (PEMERINTAH KABUPATEN BONE) with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Drs. Asiswa' is printed in bold, followed by the title 'Pangkat Pembina Utama Muda' and the NIP number '19640830 199205 1 001'.

Drs. Asiswa

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 199205 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
4.1. Rencana Program Kegiatan.....	29
4.2. Dana Indikatif.....	31
BAB V PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perluasan kesempatan kerja banyak tergantung kepada masalah pertumbuhan Ekonomi, moneter, fiskal dan investasi.

Salah Satu Masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bone di Bidang Ketenagakerjaan adalah Meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya tingkat produktivitas pekerja. Angka pengangguran diukur dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagai indicator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bone adalah 3,25 persen dimana TPT laki-laki 3,90 persen dan TPT perempuan 42,06 persen. Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat produktivitas pekerja, artinya mereka yang bekerja belum sanggup menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Tingkat pengangguran terbuka memiliki kaitan yang erat dengan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 52 persen dari angkatan kerja yang bekerja hanya tamat Sekolah Dasar (SD), tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah. Oleh karena itu, rendahnya tingkat produktivitas pekerja tampaknya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, status pekerja (pada umumnya adalah buruh tani, petani penyakap, dsb.), dan metode produksi yang masih tradisional.

Pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai sector, termasuk sektor ekonomi yang secara otomatis mempengaruhi tingkat pengangguran. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan angka pengangguran meningkat. Ini terjadi karena menurunnya aktivitas ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja menurun, bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa lapangan usaha, seperti hotel dan restoran, perdagangan, transportasi, dll. Pandemi covid-19 juga berdampak pada penduduk usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bone, jumlah penduduk usia kerja yang terkonfirmasi covid-19 adalah sebesar 1209 orang dari keseluruhan total 556317 orang jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Bone.

Dan oleh karenanya, bahwa dengan tersedianya jumlah tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur yang ditunjang dengan sumber daya ekonomi yang dapat dioptimalkan dapat membuka penyediaan lapangan kerja

dan kesempatan usaha bagi masyarakat baik yang bersifat permanen maupun temporer dalam rangka pemberdayaan sumber daya masyarakat melalui kegiatan – kegiatan ekonomi yang memiliki nilai produktif .

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa untuk mengatasi masalah ketenakerjaan telah disusun Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2021 yang merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam waktu satu tahun. Dalam penyusunan Rencana kerja memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSRENBANG tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rencana kerja SKPD dan Kecamatan serta Stakeholder

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya paralel dengan penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui koordinasi antar instansi Pemerintah Kab. Bone dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Tingkat Nasional. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti perencanaannya dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah, dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Kementerian/Lembaga terkait.

Hasil akhir perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKPD, selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan RAPBD) setiap tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Perangkat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan perubahan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Lembaran daerah No 3 Tahun 2019.
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018-2023, (Berita Daerah Kab Bone Tahun 2019 Nomor 17).

20. Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2021 adalah Menjabarkan lebih lanjut Rancangan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan 2018-2023;

B. Tujuan

Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021 bertujuan:

- Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana kerja dan anggaran (RKA-DISNAKER) Tahun 2021
- Menjadi dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Ketenagakerjaan.
- Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat dalam penyelenggaraan program pembangunan urusan Ketenagakerjaan daerah Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone Tahun 2021 disusun dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menyajikan gambaran Rencana kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 6 Penutup

Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana kerja Perangkat *Daerah* pada Tahun P

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2021 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2019 Perangkat Daerah dan proyeksi capaian kinerja hingga Tahun 2020.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja hingga tahun 2020, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, dengan mempertimbangkan realisasi capaian program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya.

Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone hingga tahun 2021 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2021, secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone pada tahun 2020, melaksanakan 8 program yang dijabarkan dalam 36 kegiatan. alokasi dana yang dianggarkan melalui program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.625.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.562.684.052 atau 96,17 persen.

1. **Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.592.159.075,- dengan realisasi sebesar Rp.540.025.087,- Atau 91,20 persen. Program ini di dukung dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp.117.703.775 dan realisasi Rp.80.398.487 Atau 68,31 persen. Dengan capaian yaitu terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik diantaranya belanja telepon selama 1 tahun.
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 126.192.000- dan realisasi sebesar Rp.118.894.000 Atau 94,22 persen. Kegiatan ini merupakan kegiatan peningkatan pengembangan penyediaan jasa atas terlaksananya proses kegiatan Jasa Administrasi Keuangan, diantaranya honorarium bulanan selama 1 tahun, belanja jasa/upah kerja selama 1 tahun.
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan anggaran Rp.4.663.000,- dan realisasi Rp.4.548.000 Atau 97.53 persen. Kegiatan ini merupakan kegiatan peningkatan pengembangan penyediaan jasa atas terlaksananya proses kegiatan jasa kebersihan kantor diantaranya, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun dan belanja jasa/upah kerja selama 1 tahun.
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan, dengan anggaran Rp.16.460.000 dan realisasi Rp.11.460.000 Atau 69,62 persen. kelengkapan sarana Dinas Ketenagakerjaan, Kegiatan ini dengan capaian yaitu Belanja Surat Kabar/ Majalah selama 1 tahun.
 - e. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah, dengan anggaran Rp.225.461.400 dan realisasi Rp.225.326.800 Atau 99.94 persen. Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan tugas di tingkat Propinsi, regional dan nasional dengan capaian Belanja perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun, Belanja perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun.
 - f. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp.101.678.900 dan realisasi Rp.99.397.800 Atau 97.76 persen. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperlancar sistem pelaporan

tertib administrasi dan pelaporan capaian kinerja tepat waktu diantaranya, belanja alat tulis kantor (ATK) selama 1 tahun, belanja cetak selama 1 tahun, belanja penggandaan selama 1 tahun.

2. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan alokasi anggaran sebesar Rp.124.725.350 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 118.183.365 atau 94.75 %. Program ini didukung dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.000.000 atau 100% Kegiatan ini pengadaan perlengkapan gedung kantor yaitu NoteBook/ Laptop dimaksudkan untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan.
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.957.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.68.900.000 atau 99.92 % untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor dengan capaian belanja Alat Listrik dan elektronik dan belanja bahan baku bangunan serta pemeliharaan gedung kantor selama 1 Tahun.
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.467.850 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.37.803.365 atau 89.02% untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional, bahan bakar minyak (BBM) dengan capaian belanja Pergantian suku Cadang selama 1 Tahun, Belanja bahan bakar minyak (BBM), Gas dan Pelumas selama 1 Tahun , Belanja jasa service selama 1 Tahun dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk kendaraan dinas roda 4 empat dan kendaraan dinas roda 2.
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.100.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.500.000 atau 71.43 % Kegiatan ini pemeliharaan terhadap perlengkapan gedung kantor dimaksudkan untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan.
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.200.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.980.000 atau 44.55 % Kegiatan ini pemeliharaan terhadap peralatan gedung kantor dimaksudkan untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.600.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.600.000 atau 100 % dan. Program ini meliputi satu kegiatan yaitu :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur, alokasi anggaran sebesar Rp. 7.600.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.600.000 atau 100 % Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas aparatur untuk kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,** Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.049.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.17.042.500 atau 99.96 %
Program ini meliputi 2 kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.664.000 dan realisasi sebesar Rp.6.657.000 atau 99.89 % kegiatan ini untuk mendukung kelancaran dalam penyusunan laporan capaian kinerja.
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.385.500 dan realisasi sebesar Rp.10.385.500 atau 100 % kegiatan ini untuk mendukung kelancaran dalam penyusunan Laporan Keuangan.
5. **Program Penunjang Pemerintahan Umum,** Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.604.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.604.000 atau 100 %
Program ini meliputi 1 kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.604.000 dan realisasi sebesar Rp. 7.604.000 atau 100 % kegiatan ini untuk mendukung kelancaran dalam penyusunan Dokument Perencanaan Perangkat Daerah.
6. **Peningkatan Kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 585.483.200 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 583.105.400 atau 99.59 %. Program ini di dukung dengan kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja,dengan alokasi anggaran sebesar Rp.436.648.700 dan realisasi sebesar Rp.436.045.400 atau 99,86 % Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pencari kerja dengan melatih 368 orang di 27 Kecamatan..

- b. Pemeliharaan rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.159.000 dan realisasi sebesar Rp.63.000.000 atau 99,75 % Kegiatan ini bertujuan untuk belanja pemeliharaan Gedung BLK selama 1 Tahun.
 - c. Bimtek Pelatihan Berbasis Kompetensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.965.500 dan realisasi sebesar Rp.11.870.000 atau 99,20% kegiatan ini untuk pelatihan berbasis kompetensi di berbagai Lembaga Pelatihan Kerja.yang diikuti sebanyak 35 Orang
 - d. Sosialisasi standar kompetensi Lembaga Pelatihan kerja (LPK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.490.000 dan realisasi sebesar Rp.46.490.000 atau 100 % yang diikuti oleh 35 Orang
 - e. Sosialisasi Regulasi Bidang Pelatihan Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.220.000 dan realisasi sebesar Rp.25.700.000 atau 94.42 % yang diikuti oleh 35 Orang
7. **Peningkatan Kesempatan Kerja**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.204.115.375 dengan Realisasi keuangan sebesar Rp.202.994.500 atau 99.45 % Program ini didukung dengan kegiatan :
- a. Perluasan kesempatan kerja melalui tenaga kerja mandiri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.150.000 dan realisasi sebesar Rp.3.150.000 atau 100 % Kegiatan ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam menyerap tenaga kerja untuk membuka wirausaha mandiri.
 - b. Bimtek pengukuran produktifitas tenaga kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.650.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.650.000 atau 100 %. bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pengukuran produktifitas tenaga kerja yang diikuti oleh 20 Orang
 - c. Sosialisasi Mekanisme Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.833.000 dan realisasi sebesar Rp.103.427.000 atau 99,61 % kegiatan ini untuk pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui sosialisasi.
 - d. Peningkatan produktifitas tenaga kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.452.250 dan realisasi sebesar Rp. 38.452.000 atau 100 %, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas UKM yang diikuti oleh 25 UKM.
 - e. Penyusunan Data Base Informasi Pasar Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.152.625 dan realisasi sebesar Rp. 29.142.000 atau 99.96

- %, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun data base informasi pasar dengan 12 Dokumen selama 1 Tahun
- f. Monitoring Evaluasi Penempatan dan penyerapan tenaga kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.877.500 dan realisasi sebesar Rp.25.173.500 atau 97,28 % kegiatan ini untuk Memonitoring penempatan dan penyerapan tenaga kerja yang ada di kabupaten bone.
8. **Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.263.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.86.129.200 atau 99,84 % Program ini didukung dengan kegiatan :
- a. Pembinaan Prosedur Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.110.000 dan realisasi sebesar Rp. 17.110.000 atau 100%, Kegiatan ini meningkatkan sosialisasi tentang pembinaan prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) serta pengawasan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja agar terpenuhinya hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dengan capaian.
- b. Bimtek Penyusunan SUSU (Struktur Skala Upah), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.076.000 dan realisasi sebesar Rp.35.053.800 atau 99,94 %, Kegiatan ini dimaksudkan untuk terwujudnya pedoman pengupahan di kabupaten bone.
- c. Pembinaan dan Penyelesaian HI (Hubungan Industrial), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.077.500 dan realisasi sebesar Rp.33.965.400 atau 99,67 %, Kegiatan ini dimaksudkan untuk membina dan menyelesaikan permasalahan sebanyak 10 Kasus.

(Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat daerah disajikan dalam tabel C.29)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Ketenagakerjaan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel
IKU Dinas Ketenagakerjaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Dinas Ketenagakerjaan
		Persentase penyerapan tenaga kerja yang terlatih	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja terserap terlatih}}{\text{Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	UPTD BLK dan Bidang Pembinaan dan Kompetensi Tenaga Kerja
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Produktifitas
2.	Meningkatnya jaminan perlindungan tenaga kerja	Persentase peserta jamsostek aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta jamsostek aktif}}{\text{Jumlah buruh/pekerja}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (PB)	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang ditangani}} \times 100\%$	Laporan Tahunan	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketenagakerjaan	Predikat Nilai SAKIP Oleh APIP	Nilai SAKIP Oleh APIP	Laporan Tahunan	Sekretariat Dinas Ketenagakerjaan

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone hingga Tahun 2020 (Semester 1) untuk pencapaian target jangka menengah Renstra Tahun 2018 – 2023 , disajikan dalam tabel berikut ini

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut ditemui beberapa kendala atau permasalahan namun tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas secara umum.

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- Bidang Ketenagakerjaan.

Isu strategisnya sebagai berikut :

1. Hak Pekerja
2. Hubungan Kerja antara pengusaha dan pekerja
3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
4. Produktifitas Tenaga Kerja
5. Persediaan lapangan Kerja
6. SDM Tenaga Kerja terlatih dibidang kewirausahaan
7. Pemutusan Hak Kerja Akibat Pandemic COVID - 19

Isu strategis berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam waktu 5(lima) Tahun kedepan dikarenakan Kesempatan kerja, sekalipun cukup terbuka namun bekerja hanya sebagai buruh kasar baik diperusahaan perkebunan maupun pertambangan. Dan disektor perikanan laut, buruh angkut dan petani. Isu strategis berkaitan dengan kualitas tenaga kerja adalah hal yang perlu dilakukan 5(lima) Tahun kedepan dikarenakan :

1. Tingginya angka keluaran SLTP dan SLTA menjadi angkatan kerja untuk siap menjadi tenaga kerja.
2. Masih rendahnya sumber daya manusia dan keterampilan lulusan untuk masuk dunia kerja karna tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga tercooper pada pekerjaan buruh kasar seperti tenaga kerja SD dan SLTP.

3. Masalah alih jasa tenaga kerja (outsourcing)
4. Pengiriman tenaga kerja keluar Negeri (TKI) yang masih bermasalah dalam penangannya.
5. Penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) belum berjalan maksimal.
6. Masalah wajib lapor tenaga kerja pada perusahaan belum maksimal.
7. Masalah wajib lapor lowongan kerja pada perusahaan belum maksimal

Kendala atau pemmasalahan Dinas Ketenagakerjaan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Proses pencairan dana kadang-kadang terlambat sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
2. Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas, pendidikan dan pelatihan masih terbatas
3. Keterbatasan tenaga pelatih/instruktur latihan keterampilan belum maksimal
4. Keterbatasan pejabat teknis fungsional terutama aparat tenaga pengawas ketenagakerjaan, pengantar kerja dan mediator
5. Tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga instruktur masih relatif rendah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya. Dengan penyesuaian Renstra

berdasarkan nomenklatur program dari permendagri 13 menjadi permendagri 90

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2021 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.00 Dinas Ketenagakerjaan
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.00 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						4,669,617,600	8,720,942,878					
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,591,368,960	6,167,692,178					
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						84,451,230	145,200,000					
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	22,396,360	36,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7,603,110	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7,603,110	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dan Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja Pembangunan Daerah yang diikuti	4 Dokumen	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	24,649,720	36,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Evaluasi Kinerja yang di lakukan	6 Dokumen	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	22,198,930	36,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,792,615,176	4,407,349,178					
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	1 Tahun	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu	100 %	3,769,618,156	4,371,049,178	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Laporan	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu	100 %	10,161,400	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Bulan	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	16,800,000	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah	1 Tahun	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	185,430,000	393,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									47,447,000	157,300,000		
2 07 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuha	6 Unit	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	47,447,000	157,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									329,272,244	698,170,000		
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi per bulan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	84 Rekening	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	100 %	92,670,764	274,670,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	1 Tahun	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	100 %	236,601,480	423,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									42,850,000	125,214,000		
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	4 Unit	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	33,850,000	88,914,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan per triwulan	15 Unit	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	9,000,000	36,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA									8,082,990	78,650,000		
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)									8,082,990	78,650,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	76 Persen	Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Persentase pemenuhan data perencanaan Tenaga Kerja	100 %	8,082,990	78,650,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										46,465,430	1,960,750,000	
2 07 03	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										41,384,080	1,870,000,000	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	40 Persen	Jumlah tenaga kerja perempuan dan laki-laki dari berbagai kejuruan yang mengikuti pelatihan	16 Orang	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan	150 Orang	41,384,080	1,870,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 03	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										5,081,350	90,750,000	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	40 Persen	Terciptanya lembaga pelatihan maju dan berdaya saing	20 LPK	Jumlah LPK yang mendapat pembinaan pelatihan kerja	20 LPK	5,081,350	90,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										18,661,620	411,000,700	
2 07 04	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										13,528,120	78,650,000	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	65 Persen	Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1 Tahun	Persentase Pelayanan Informasi Pasar Kerja	100 %	13,528,120	78,650,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota										5,133,500	332,350,700	
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	65 Persen	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi bagi calon pekerja migran indonesia indonesia	30 Orang	Persentase PMI yang mengikuti pembinaan	100 %	5,133,500	332,350,700	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										5,038,600	102,850,000	
2 07 05	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										5,038,600	102,850,000	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata Kelola yang layak (PP/PKB, LKS, Bripartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	70 Persen	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	100 %	Persentase Kasus yang di selesaikan dan Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Aktif.	100 %	5,038,600	102,850,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
TOTAL											4,669,617,600	8,720,942,878	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone merupakan perangkat daerah yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, di bidang ketenagakerjaan Kab. Bone. Sehingga keterkaitan secara langsung dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone selalu mendapat usulan program atau kegiatan secara langsung melalui musrenbang mengenai peningkatan keterampilan dan produktifitas masyarakat agar dapat diberdayakan menjadi tenaga kerja yang kompeten, program dan kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut selalu dimasukkan dalam rencana kerja tahunan.

Namun demikian, Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone, tetap mengamati isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diserap masuk dalam perencanaan kinerja tahunan. Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat umumnya merupakan hal-hal yang terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengaduan masyarakat yang oleh Dinas Ketenagakerjaan dijadikan sebagai salah satu aspek pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan dalam batas-batas kewenangan dan penugasan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk didalamnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dan Kontrak kinerja yang telah ditetapkan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai Program Prioritas yang terdiri dari Prioritas Nasional, Prioritas Bidang dan Prioritas Kementerian Ketenagakerjaan serta kontrak kinerja menteri melalui 6 (enam) Program Teknis dan 3 (tiga) Program Pendukung.

3.1.1. Bidang Tenaga Kerja.

Pembangunan Tahun 2018 – 2023 diarahkan untuk :

- a. Mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik, yaitu lapangan kerja Produktif serta adanya perlindungan dan jaminan sosial yang memadai.
- b. Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan.
- c. Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industri untuk mendorong kesempatan kerja.
- d. Menyempurnakan Peraturan-peraturan dan melaksanakan peraturan Pokok (utama) sesuai hukum Internasional.
- e. Mengembangkan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja.
- f. Meningkatkan Kompetisi Tenaga Kerja dan Produktivitas.
- g. Menciptakan kesempatan kerja melalui program-program Pemerintah.
- h. Mengembangkan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Memasuki Pembangunan Tahun 2018 - 2023, pembangunan dibidang diperkirakan masih diwarnai permasalahan antara lain :

1. Tingginya tingkat pengangguran karena meningkatnya angkatan kerja pertahun
2. Rendahnya perluasan kesempatan kerja.
3. Rendahnya kompetisi dan produktivitas tenaga kerja.
4. Belum kondusifnya kondisi hubungan industri.

Untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menyusun program dan kegiatan.

Telaahan mengenai Renstra kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja dan Produktivitas, melalui kegiatan :
 - a. Pelatihan Kewirausahaan.
 - b. Pengembangan Standardisasi Kompetensi kerja dan Program Pelatihan.
 - c. Peningkatan kompetensi Instruktur dan tenaga kepelatihan.
 - d. Pengembangan dan peningkatan Produktivitas.
 - e. Peningkatan penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri.
 - f. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan pelatihan dan produktivitas.
 - g. Pengembangan sistem dan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi.
 - h. Pengembangan dan peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kerja.
 - i. Pelaksanaan dan peningkatan Produktivitas.
 - j. Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja dan Pengembangan Program Pelatihan bidang Ketenagakerjaan.
 - k. Pengembangan dan peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga kerja.
 - l. Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja bidang Industri.
 - m. Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembina Pelatihan dan Produktivitas.
 - n. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Nasional sertifikasi Profesi.

Program ini bertujuan untuk peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga kerja, untuk mencetak Tenaga kerja dan Wirausaha baru yang berdaya saing, untuk mendukung program ini Bidang Tenaga kerja Dinas Kabupaten Bone dalam Renstra 2018 – 2023 telah menyusun Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja beserta kegiatannya.

Indikator kinerja dari dari Program ini adalah meningkatnya daya saing dan Produktivitas tenaga kerja, yang diukur melalui.

- Jumlah standar kompetensi dan program yang telah disusun.
- Jumlah lembaga pelatihan dan Produktivitas yang dikembangkan.
- Jumlah peserta Pemagangan dalam dan luar Negeri.
- Jumlah Instruktur dan tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya.

- Jumlah Tenaga kerjayang dilatih.
- Jumlah lembaga/organisasi dan masyarakat yang ditingkatkan produktivitasnya.

2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempata kerja, dengan kegiatan.

- Penempatan tenaga kerja dalam Negeri.
- Pembinaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri
- Pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja.
- Peningkatan pengembangan pasar kerja.
- Peningkatan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
- Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan tenaga kerja.

Program kegiatan ini bertujuan untuk perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan kerja baik didalam maupun diluar Negeri. Untuk mendukung program ini Bidang Tenaga Kerja Dinas Kabupaten Bone dalam Renstra 2018 – 2023 telah menyusun program Peningkatan Kesempatan Kerja beserta kegiatannya.

Indikator kinerja dari program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitas pelayanan penempatan tenaga kerja, yang diukur melalui :

- a. Jumlah penempatan tenaga kerja.
- b. Jumlah Lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan standar pelayanan minimum.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lebaga Ketenaga Kerjaan, dengan kegiatan meliputi :

- a. Sosialisasi peraturan-peraturan .
- b. Pengelolah kelembagaan dan masyarakatan hubungan Industri.
- c. Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan PHK dan penyelesaian hubungan Industrial.
- d. Konsolidasi peningkatan pelaksanaan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja yang lebih baik.

- e. Konsolidasi pembinaan Syarat-syarat kerja Non Diskriminasi.
- f. Peningkatan penerapan Norma Ketenaga kerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja.
- g. Peningkatan peran serta lembaga-lembaga dan personil dalam penerapan Norma ketenaga kerjaan.
- h. Peningkatan penerapan keselamatan dan keehatan kerja.
- i. Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.
- j. Dukungan manajemen dan dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaga Kerjaan.

Indikator kinerja Program perlindungan dan pengembangan ketenaga kerjaan adalah meningkatnya pembinaan hubungan industri dan jaminan sosial Tenaga kerja melalui persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi, pengupahan, penyelesaian hubungan industrial serta meningkatnya penerapan perturan Perundang-undangan ketenaga kerjaan ditempat kerja, yang diukur dari :

- Jumlah tenaga kerja yang menjadi anggota Jamsostek.
- Persentase Kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui mediator.
- Jumlah lembaga kerja sama Bipartif yang dibentuk.
- Jumlah lembaga kerja sama Tripartif yang dibentuk.
- Jumlah peraturan Perusahaan yang disahkan.
- Jumlah perjanjian kerja sama yang didaftarkan.
- Jumlah wajib lapor ketenaga kerjaan yang didaftarkan.
- Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselaman dan Kesehatan Kerja (SMK 3).
- Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi.
- Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
- Persentase perusahaan yang memenuhi norma pekerja perempuan.
- Jumlah pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja.

Untuk mendukung program ini bidang hubungan industrial dan Jamsostek serta bidang Pembina Pengawasan Ketenaga kerjaan Dinas Kabupaten Bone dalam Renstra 2018 – 2023 telah menyusun program perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenaga kerjaan beserta kegiatannya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Dinas sebagai berikut:

1. Tujuan :

Tujuan dari Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja daerah.

2. Sasaran :

- a. Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten.
- b. Meningkatnya jaminan perlindungan tenaga kerja.

Indikator kinerja (*dampak*) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2020, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kompetensi pencari kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja daerah.	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja yang berkompoten.	Tingkat pengangguran terbuka	3,20 %	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah B. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) C. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta D. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota E. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase penyerapan tenaga kerja terlatih	60 %	
		Jumlah Tenaga kerja yang di tempatkan	82 %	
	Meningkatnya jaminan perlindungan tenaga kerja. mengakses peluang kerja di dalam dan luar negeri.	Persentase peserta jamsostek aktif	79 %	
		Besaran kasun yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	100 %	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan urusan .	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan urusan	Nilai SAKIP oleh APIP	BB	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- C. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi
 2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- D. Program Penempatan Tenaga Kerja
 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 2. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- E. Program Hubungan Industrial
 1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4.a Dana Indikatif

A. Bidang Kesekretariatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Rp. 22,396,360,-
2.	Jumlah Dokumen RKASKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Rp. 7,603,110,-
3.	Jumlah Dokumen DPASKPD Perangkat Daerah yang tersusun	Rp. 7,603,110,-
4.	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dan Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja Pembangunan Daerah yang diikuti	Rp. 24,649,720,-
5.	Jumlah Evaluasi Kinerja yang di lakukan	Rp. 22,198,930,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1.	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Rp. 3,769,618,156,-
2.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	Rp. 10,161,400,-
3.	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	Rp. 12,835,620,-

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Rp. 9,644,220,-
2.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Rp. 9,644,220,-

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	Rp. 11,052,560,-
2.	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek yang diikuti oleh ASN Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi	Rp. 22,125,000,-

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1.	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	Rp. 18,174,990,-
2.	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	Rp. 12,306,3200,-
3.	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	Rp. 9,556,000,- Rp. 16,800,000,-

4.	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	Rp. 185,430,000,-
5.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah	

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1.	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuha	Rp. 47,447,000,-

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1.	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi per bulan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	Rp. 92,670,764,-
2.	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Rp. 236,601,480,-

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun	Rp. 33,850,000,-
2.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan per triwulan	Rp. 9,000,000,-

B. Bidang Ketenagakerjaan

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1	Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Rp. 8,082,990,-

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1	Jumlah tenaga kerja perempuan dan laki-laki dari berbagai kejuruan yang mengikuti pelatihan	Rp. 41,384,080,-

2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1	Terciptanya lembaga pelatihan maju dan berdaya saing	Rp. 5,081,350,-

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1	Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp. 13,528,120,-

2. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi bagi calon pekerja migran indonesia Indonesia.	Rp. 5,133,500,-

5. Program Hubungan Industrial

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN	Estimasi Anggaran Th.2022
1	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama.	Rp. 5,038,600,-

Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang merupakan outcome, output, dan input masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Ditetapkan pula dana atau anggaran sebagai input program/kegiatan merupakan pagu rencana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone Tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023. Selain itu ditentukan juga lokasi dan sumber dana dalam pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone.

Secara lengkap, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kab. Bone Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini ;

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.00 Dinas Ketenagakerjaan
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.00 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						4,669,617,600	8,720,942,878				
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,591,368,960	6,167,692,178				
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						84,451,230	145,200,000				
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas 1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	22,396,360	36,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas 1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7,603,110	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas 1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7,603,110	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas 1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dan Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja Pembangunan Daerah yang diikuti	4 Dokumen	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	24,649,720	36,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas 1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Evaluasi Kinerja yang di lakukan	6 Dokumen	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	22,198,930	36,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,792,615,176	4,407,349,178				
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas 1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan luran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	1 Tahun	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu	100 %	3,769,618,156	4,371,049,178	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas 1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Perangkat Daerah yang tersusun	1 Laporan	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu	100 %	10,161,400	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah yang tersusun	3 Laporan	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu	100 %	12,835,620	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										19,288,440	36,300,000	
2 07 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	9,644,220	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	1 Laporan	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	9,644,220	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										33,177,560	92,159,000	
2 07 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	12 Dokumen	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	11,052,560	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Kegiatan Diklat/Bimtek yang diikuti oleh ASN Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi	1 Orang	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	22,125,000	74,009,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										242,267,310	506,000,000	
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan	1 Tahun	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	18,174,990	36,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Bulan	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	12,306,320	36,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Bulan	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	9,556,000	22,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan	12 Bulan	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	16,800,000	18,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah	1 Tahun	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	185,430,000	393,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										47,447,000	157,300,000	
2 07 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	6 Unit	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	47,447,000	157,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										329,272,244	698,170,000	
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Komunikasi per bulan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan per bulan	84 Rekening	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	100 %	92,670,764	274,670,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	1 Tahun	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	100 %	236,601,480	423,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										42,850,000	125,214,000	
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun	4 Unit	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	33,850,000	88,914,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas	1.1. Berkurangnya kasus KKN	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan per triwulan	15 Unit	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	9,000,000	36,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA										8,082,990	78,650,000	
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										8,082,990	78,650,000	

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	76 Persen	Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Persentase pemenuhan data perencanaan Tenaga Kerja	100 %	8,082,990	78,650,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											46,465,430	1,960,750,000	
2 07 03	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										41,384,080	1,870,000,000	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	40 Persen	Jumlah tenaga kerja perempuan dan laki-laki dari berbagai kejuruan yang mengikuti pelatihan	16 Orang	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan	150 Orang	41,384,080	1,870,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										5,081,350	90,750,000	
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	40 Persen	Terciptanya lembaga pelatihan maju dan berdaya saing	20 LPK	Jumlah LPK yang mendapat pembinaan pelatihan kerja	20 LPK	5,081,350	90,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										18,661,620	411,000,700	
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										13,528,120	78,650,000	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	65 Persen	Terlaksananya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1 Tahun	Persentase Pelayanan Informasi Pasar Kerja	100 %	13,528,120	78,650,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota										5,133,500	332,350,700	
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	65 Persen	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi bagi calon pekerja migran Indonesia Indonesia	30 Orang	Persentase PMI yang mengikuti pembinaan	100 %	5,133,500	332,350,700	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										5,038,600	102,850,000	
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										5,038,600	102,850,000	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	2.3. Tersedianya lapangan pekerjaan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata Kelola yang layak (PP/PKB, LKS, Bripartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	70 Persen	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	100 %	Persentase Kasus yang di selesaikan dan Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Aktif.	100 %	5,038,600	102,850,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
TOTAL											4,669,617,600	8,720,942,878	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone tahun 2021 secara umum maupun secara khusus disusun sebagai pedoman bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Bone tahun 2022 dan juga dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan pada RENSTRA tahun 2018-2023

Hasil pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan akan dijadikan sebagai bahan untuk mengendalikan program dan kegiatan serta selanjutnya memberikan solusi yang efektif dan berkualitas dalam rangka perbaikan kinerja dinas secara keseluruhan. Dan hal ini dijadikan sebagai acuan dalam rangka penetapan Rencana Kerja tahun berikutnya, disamping itu juga akan menjadi acuan bagi Kepala Dinas untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada aparat pada lingkup Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone serta penyampaian laporan kinerja kepada Bupati Bone.

Perlu disadari bahwa dengan semakin bertambahnya wirausaha baru dan bertambahnya pencari kerja akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Untuk itu penyelesaiannya harus secara bertahap dan komprehensif oleh seluruh staf Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Bone dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten Bone.

Kami menyadari, bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami senantiasa mengharapkan masukan dari segenap yang berkompeten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini.

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bone tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

Hambatan dan Permasalahan

1. Aspek Pemerintahan

- Belum maksimalnya pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsinya
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan pelatihan
- Masih kurangnya tenaga instruktur/pelatih dan tenaga pengawas ketenagakerjaan serta tenaga pengawasan ketenagakerjaan serta tidak adanya mediator dan pengantar kerja.
- Belum memadainya sistem informasi dan komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat serta dukungan pihak terkait dalam pelaksanaan urusan ketenagakerjaan.
- Semakin besarnya tuntutan dan dinamika masyarakat dalam pemenuhan segala aspek kehidupan dalam hal mencapai kehidupan yang layak.
- Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten dalam hal pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran.
- Keterbatasan dalam menjalin hubungan dengan dunia usaha baik dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.

2. Aspek Dunia Usaha

- Masih rendahnya kepekaan dan daya tangkap masyarakat terhadap peluang usaha dan kebutuhan pasar dalam penciptaan wirausaha baru.
- Rendahnya kemampuan mengakses informasi pasar kerja terutama pada sektor industri
- Pelaksanaan jaringan usaha dan pola kemitraan belum berjalan optimal
- Masih banyaknya pengusaha yang belum memenuhi kewajiban kepada pemerintah sesuai dengan norma kerja
- Komitmen perwujudan pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah belum optimal, hal ini disebabkan oleh dominasi pengusaha yang besar.
- Persaingan dunia usaha semakin meningkat akan tetapi fluktuasi praktek monopoli kegiatan usaha semakin berkembang.

3. Aspek Masyarakat

- Tingginya angka pengangguran
- Jiwa wirausaha yang lemah
- Kurangnya investasi yang memberikan lowongan pekerjaan
- Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pasar
- Masih rendahnya pemanfaatan potensi lokal masyarakat dalam hal pembinaan pemberdayaan tenaga kerja
- Masih rendahnya budaya dan etos kerja pada sebagian masyarakat sehingga berpengaruh terhadap tingginya angka pengangguran
- Masih adanya pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa bekerja adalah menjadi pegawai negeri.
- Semakin tingginya tingkat persaingan antar daerah dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing daerah.
- Semakin besarnya tuntutan dan dinamika masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara luas.

4. Pemecahan Masalah

Untuk menyikapi permasalahan ketenagakerjaan tersebut di atas, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Sebagai langkah solutif atas permasalahan/hambatan tersebut, maka telah dilakukan penyesuaian khusus dari aspek pembiayaan dan pengupayaan peningkatan sumber daya manusia aparatur melalui bimbingan teknis aparat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan memberdayakan tenaga pelatih/instrukturn yang ada dan mengontrak instruktur sesuai kebutuhan serta mengatur jadwal kegiatan pelatihan sedemikian rupa sehingga instruktur yang ada dapat diatur dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelatihan.
3. Mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terhadap kekurangan pegawai khususnya tenaga pengawasan, mediator, pengantar kerja dan instruktur sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
4. Mengadakan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan dan pekerja terhadap program kelembagaan dan perlindungan ketenagakerjaan

5. Melaksanakan pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi, masyarakat dan berbasis kewirausahaan berdasarkan sumber daya alam suatu wilayah dan sumber daya manusia.
6. Menginventarisir pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan keterampilan dari berbagai jenis kejuruan sebagai tenaga kerja siap pakai.
7. Meningkatkan koordinasi pada instansi terkait, stake holder dan perusahaan untuk penyerapan tenaga kerja sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan